Kementerian PPN/
Bappenas

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020 - 2024

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian PPN/
Bappenas

RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020 - 2024

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Arahan RPJP Nasional 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Periode pemerintahan ini didasarkan pada visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi Presiden tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

MISI

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Visi Indonesia 2045

RPJMN 2020-2024 sebagai tahapan akhir dari RPJPN 2005-2025, merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Hal ini diindikasikan dengan kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama.

Gambar 1.1
Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju

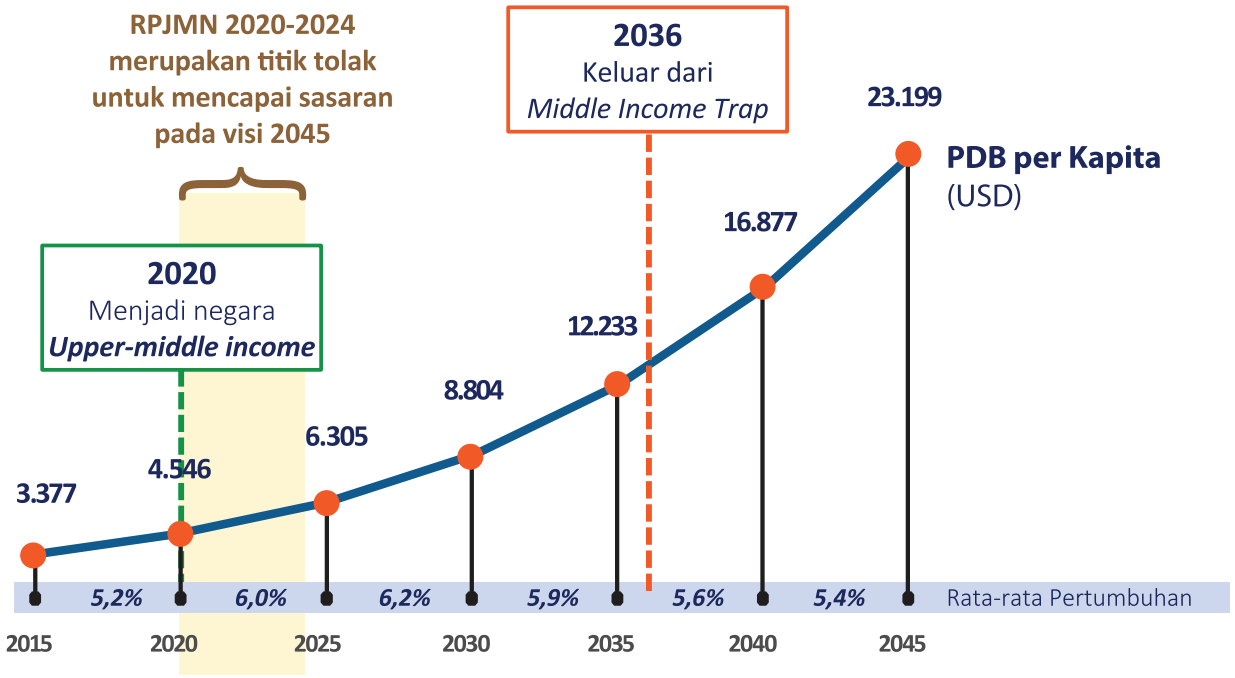

TRANSFORMASI EKONOMI dimulai pada tahun **2020-2024**
untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju

RATA-RATA PERTUMBUHAN 2015-2045:		TAHUN 2045:	
PDB RIIL	PDB RIIL PER KAPITA	NEGARA MAJU DAN PDB TERBESAR	PERANAN KTI MENJADI
5,7%	5,0%	ke-5 (USD 7,4 triliun)	25%

Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PEMBANGUNAN SDM

STRATEGI

LAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda

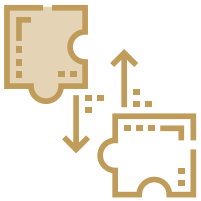

PRODUKTIVITAS

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Pendidikan Tinggi
3. Iptek dan Inovasi
4. Prestasi Olahraga

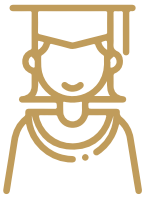

PEMBANGUNAN KARAKTER

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
3. Moderasi Beragama
4. Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas

HIGHLIGHT SASARAN 2024

- 100% penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian
- 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial
- 183 per 100.000 kelahiran hidup angka kematian ibu
- 9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif
- Indeks Perlindungan Anak: 73,08

- 52,1% Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
- 80% lulusan Perguruan Tinggi langsung bekerja
- 40% hasil inovasi Prioritas Riset Nasional
- 3 Medali Emas baik *Olympic Games* maupun *Paralympic Games* tahun 2024
- 50% pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi

- Indeks Capaian Revolusi Mental: 74,3
- Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
- Indeks Kerukunan Umat Beragama: 75,8
- Nilai Budaya Literasi: 71,0
- Indeks Pembangunan Keluarga: 61,0
- Median usia kawin pertama perempuan: 22,1

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

STRATEGI

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
- Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
- Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
- Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

INFRASTRUKTUR EKONOMI

KONEKTIVITAS

Darat
Jalan Tol, Jalan Baru, Jalan Trans Pulau 3T, dan pelabuhan penyeberangan baru

Kereta Api
KA kecepatan tinggi dan KA angkutan barang

Laut
Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu

Udara
Bandara Baru, Jembatan Udara

SEKTOR EKONOMI

Industri Pengolahan

Jasa dan Pariwisata

Pertanian Perkebunan Kawasan/Klaster Kelautan-Perikanan

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

- Transportasi Perkotaan
- Energi Berkelanjutan Perkotaan
- Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan
- Akses Air Minum Perpipaan dan Sanitasi Perkotaan yang Layak dan Aman
- Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

- Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan
- Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan
- Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL

- Penuntasan Infrastruktur TIK
- Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital

HIGHLIGHT SASARAN 2024

INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

70%
Rumah Tangga Menempati Hunian Layak

100%
Hunian dengan Akses Air Minum Layak »
Termasuk Akses Aman 15%

90%
Hunian dengan Akses Sanitasi Layak »
Termasuk Akses Aman 15%

30%
Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan

500 Ribu ha
Jaringan Irigasi Baru

50 m^3/detik
Tambahan Air Baku Industri & Domestik

63
Bendungan Multiguna

3 m^3/kg
Produktivitas Air untuk Padi

20 Provinsi
berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana

INFRASTRUKTUR EKONOMI

KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa
Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung

Kereta Api
Makassar - Parepare

Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu

43 Rute
Jembatan Udara

2.500 km
Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi

3.000 km
Jalan Nasional Baru

97%
Kondisi Mantap Jalan Nasional

1,9 jam/100 km
Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau

27%
Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (*loop*)

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di
6 Wilayah Metropolitan

80% Penanganan
20% Pengurangan
Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik

ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

1.400 kWh
Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional

100 %
Rasio Elektrifikasi

4 Juta
Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota

6 Unit
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak

TRANSFORMASI DIGITAL

95% SLA
Layanan Palapa Ring

95%
Desa Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar

60% Kecamatan
Cakupan Jaringan Tetap Pita Lebar

80%
Populasi Terjangkau
Siaran Digital

3
Start Up
***Unicorn* Baru**

PENYEDERHANAAN REGULASI

STRATEGI

PENDEKATAN *OMNIBUS LAW*

Penerapan pendekatan ***Omnibus Law***
(Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya)

TAHUN 2019			TAHUN 2024	
177	UU terkait **Cipta Lapangan Kerja** (termasuk regulasi terkait kemudahan dan perlindungan UMKM)	PENYEDERHANAAN PENCABUTAN PENGGABUNGAN	RUU Cipta Lapangan Kerja	
73	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)		menuju 40	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)

PENDEKATAN TERHADAPREGULASI YANG AKAN DISUSUN

Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Analysis*/RIA)
Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost And Benefit Analysis*/CBA)

Mengurangi tumpang tindih regulasi
(membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama)

Regulasi yang berorientasi tujuan

Regulasi yang mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

STRATEGI

PENYEDERHANAAN PROSEDUR

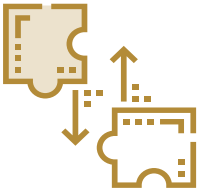

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK KEGIATAN EKSPOR/IMPOR, KEPABEANAN, DAN KEPELABUHAN

HIGHLIGHT SASARAN 2024

4 hari waktu memulai usaha (EoDB)

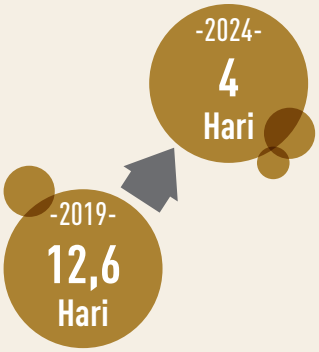

Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): ≥ 2,6 (predikat baik)

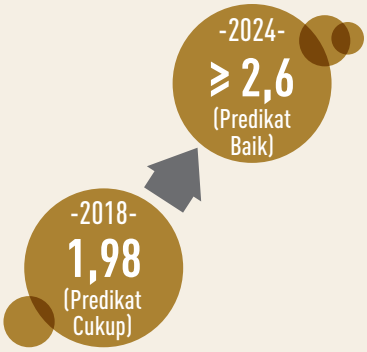

*Indeks Maturitas SPBE menggambarkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi dan layanan publik pemerintah

2,9-3,2 hari waktu rata-rata pengeluaran barang *(dwelling time)*

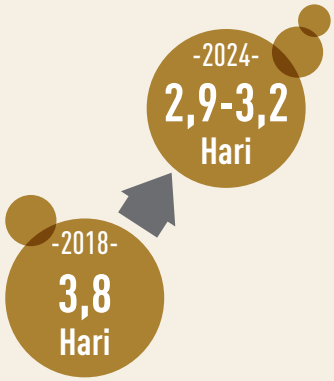

TRANSFORMASI EKONOMI

STRATEGI

INDUSTRIALISASI

Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global

PENGEMBANGAN DESTINASI UNGGULAN

Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas

PENGUATAN EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI DIGITAL

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, *fashion*, kriya, aplikasi dan konten digital, *games*, film, dan musik.

HIGHLIGHT SASARAN 2024

Kontribusi PDB industri pengolahan

-2018- 19,9 persen → -2024- 21,0 persen

Kontribusi PDB industri pengolahan non migas

-2018- 17,6 persen → -2024- 18,9 persen

Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja

-2018- 14,9 persen → -2024- 15,7 persen

Devisa pariwisata

-2018- USD 19,3 miliar → -2024- USD 30 miliar

Nilai tambah ekonomi kreatif

-2018- Rp 1.105 triliun → -2024- Rp 1.846 triliun

Nilai transaksi *e-commerce*

-2018- Rp 170 triliun → -2024- Rp 600 triliun

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada Gambar 1.2.

VISI PRESIDEN

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"

MISI PRESIDEN	ARAHAN PRESIDEN	7 AGENDA PEMBANGUNAN
1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1 Pembangunan SDM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2 Pembangunan Infrastruktur	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3 Penyederhanaan Regulasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4 Penyederhanaan Birokrasi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5 Transformasi Ekonomi	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3) Moderasi beragama; dan
4) Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1) Penyusunan Prioritas pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan keunggulan wilayah;
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana; dan
5) Penyerderhanaan perijinan pembangunan infrastruktur.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
3) Pembangunan Rendah Karbon.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Melalui:

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Gambar 1.2
Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan

Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2020-2024

Kilas Balik Ekonomi Makro Tahun 2015-2019

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 menghadapi berbagai peristiwa ekonomi global, seperti *Brexit*, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era *commodity boom*. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 berjalan lamban.

Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN (Tahun 2015 – tiga triwulan pertama tahun 2019). Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun[1]. Pencapaian tersebut terjadi karena diberlakukannya berbagai kebijakan reformasi struktural, antara lain melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, diantaranya: (1) Industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, di antaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun.

Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,8 persen per tahun.

Stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari laju inflasi dan nilai tukar yang terkendali, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Sepanjang tahun 2015– 2019, inflasi mencapai rata-rata 3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD126,6 miliar pada November 2019.

Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang berada pada kisaran 30 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan

1. Berdasarkan World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019.

defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB.

Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita (*Atlas Method*) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi[2].

Tingkat kemiskinan turun hingga satu digit (9,41 persen pada Maret 2019), karena program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan antargolongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018).

Target pertumbuhan ekonomi dan target pembangunan lainnya merupakan sasaran makro pembangunan.

Gambar 1.3
Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019

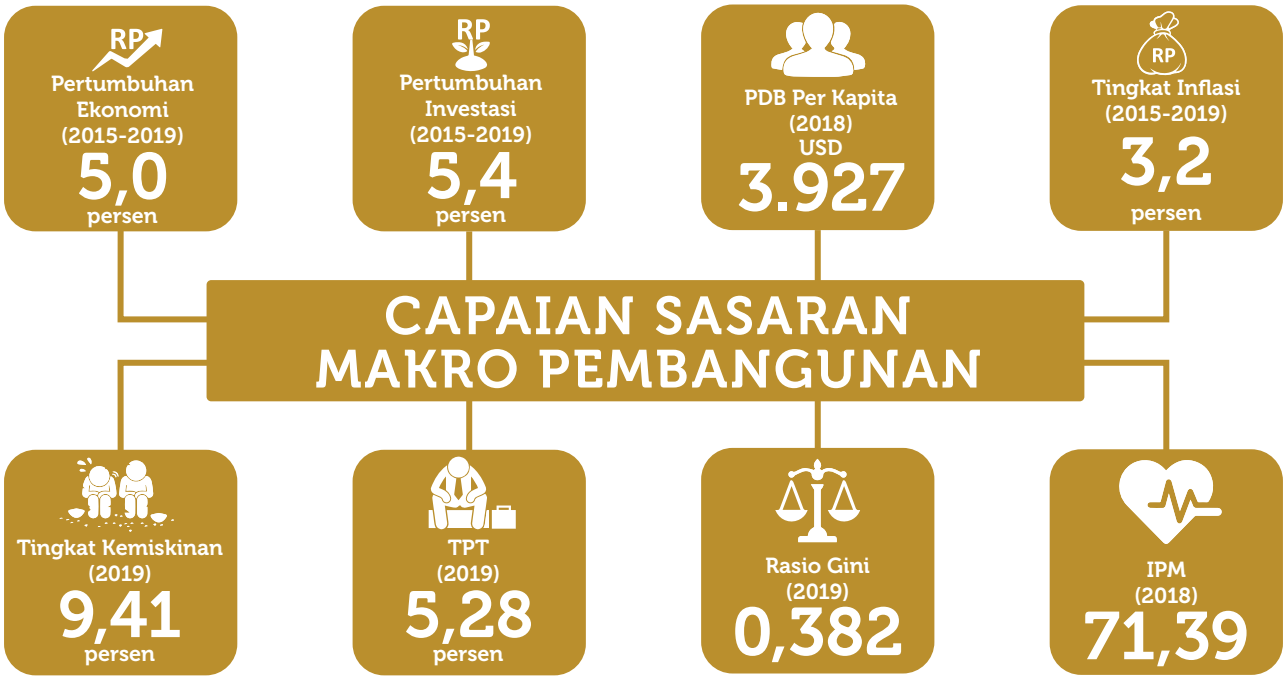

Catatan: Angka 2019 berdasarkan realisasi terakhir sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi dan investasi berdasarkan data hingga tiga triwulan pertama tahun 2019
- Tingkat kemiskinan dan rasio gini berdasarkan data Maret 2019
- Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data Agustus 2019

2.Batas GNI per kapita (*Atlas Method*) negara berpendapatan menengah tinggi menurut *World Bank* per Juli 2018 sebesar USD3.896.

Tantangan Perekonomian Tahun 2020-2024

Ketidakpastian Global

Ke depan, risiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan[3] sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batubara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Selain itu, risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan

Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (*Growth Diagnostics*)[4] menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (*the most binding constraint*) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur berteknologi tinggi. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen YoY)

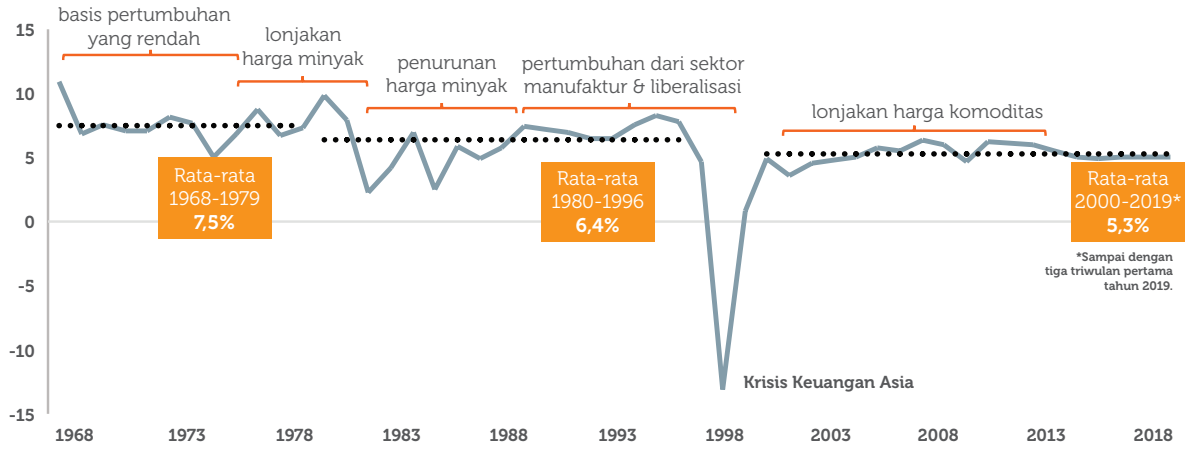

3. Berdasarkan *World Economic Outlook Database* IMF Oktober 2019.
4. Studi *Growth Diagnostic* Bappenas 2018.

Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat

Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 18,3 persen (sampai dengan tiga triwulan pertama 2019). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa *peer countries* sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning)*, pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology* (*fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis *online* belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

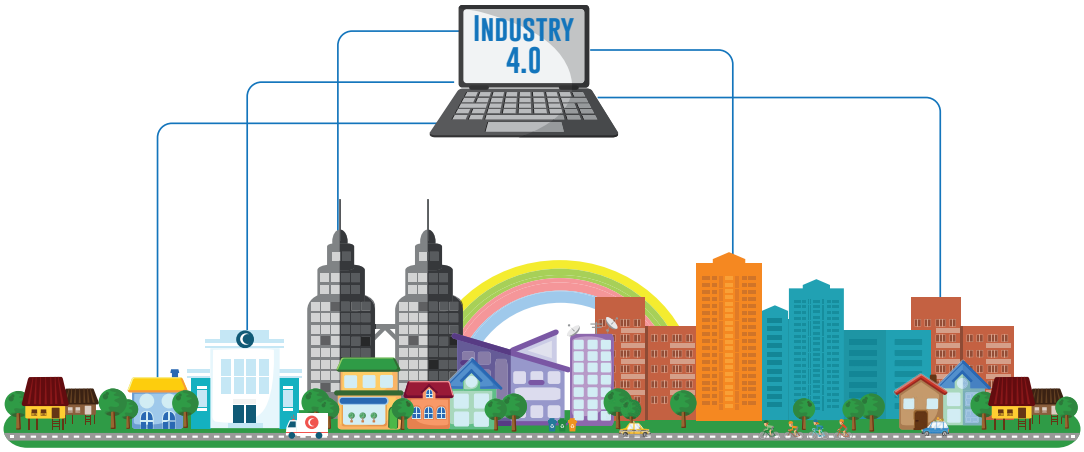

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 6,0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, *Gross National Income* (GNI) per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi USD6.010 per kapita pada tahun 2024.

Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tetap menjadi prioritas. Sasaran inflasi tahun 2020-2024 dijaga stabil dengan tren menurun, menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2024. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.

Gambar 1.5
Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

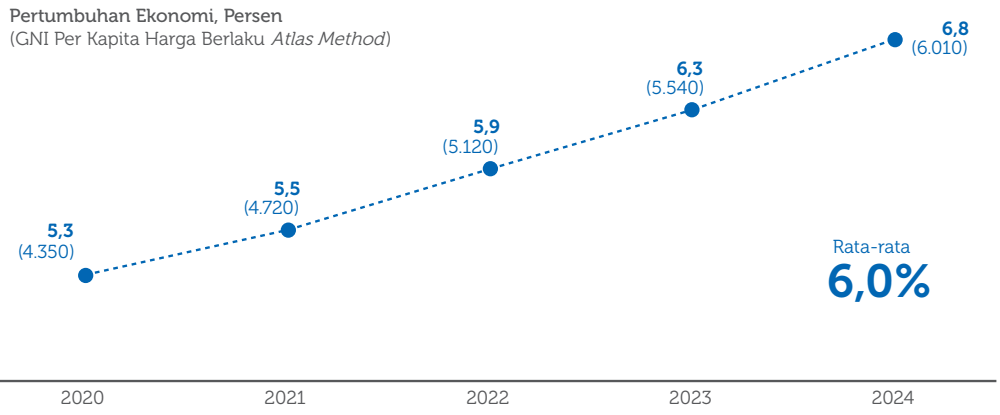

Gambar 1.6
Rincian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

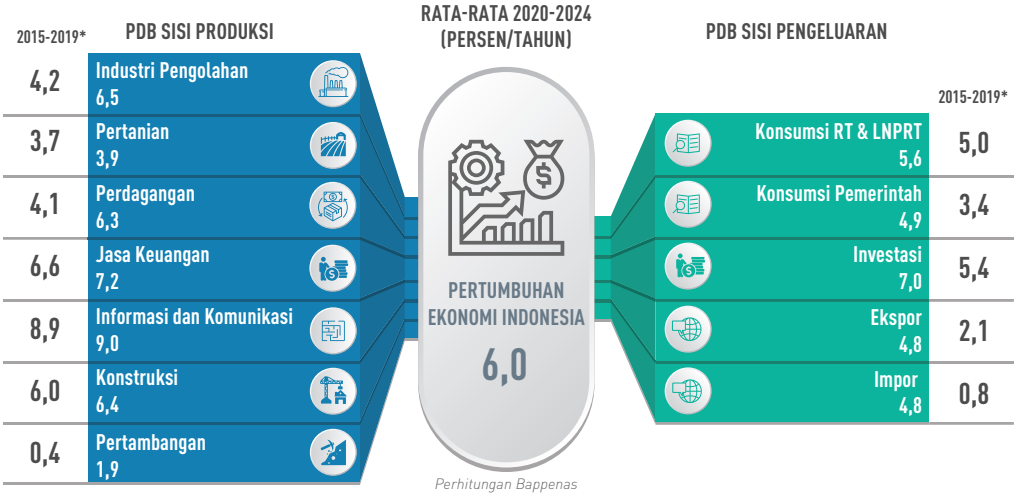

*Angka tahun 2019 merupakan perkiraan

Gambar 1.7
Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020-2024

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0 – 7,0 persen dan 3,6 – 4,3 persen; tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360 – 0,374; dan IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54.

Salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan adalah transformasi struktural. Perbaikan transformasi struktural utamanya didorong oleh revitalisasi industri pengolahan dengan tetap mendorong perkembangan sektor lain melalui transformasi pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan transformasi sektor jasa.

Gambar 1.8
Sasaran PDB Sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan

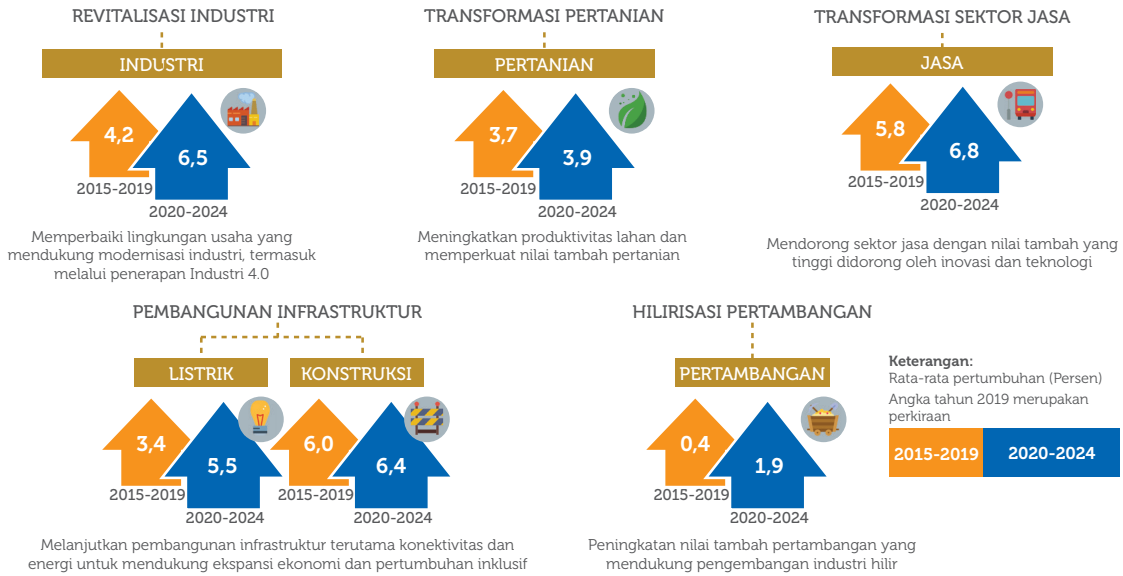

Memperkuat Permintaan Domestik

Di sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat (rumah tangga dan Lembaga Non Profit Rumah Tangga/LNPRT) diharapkan tumbuh rata-rata 5,6 persen per tahun. Peningkatan konsumsi masyarakat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarat seiring dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar dan lebih baik, stabilitas harga, dan bantuan sosial pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Konsumsi pemerintah tumbuh rata-rata 4,9 persen per tahun didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, baik pusat maupun transfer ke daerah, seiring dengan peningkatan pendapatan negara, terutama penerimaan perpajakan.

Ekspansi perekonomian 2020-2024 terutama didorong oleh peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) yang tumbuh 7,0 persen per tahun. Untuk mencapai target tersebut, investasi swasta (asing maupun dalam negeri) didorong melalui deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan, termasuk meningkatkan *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari peringkat 73 pada tahun 2019 menuju peringkat 40 pada tahun 2024. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan stok infrastruktur menjadi 49,4 persen PDB dan belanja modal pemerintah yang tumbuh 24,1 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024. Peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan produktivitas, yang mendorong peningkatan efisiensi investasi.

Gambar 1.9
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Memperkuat Permintaan Domestik

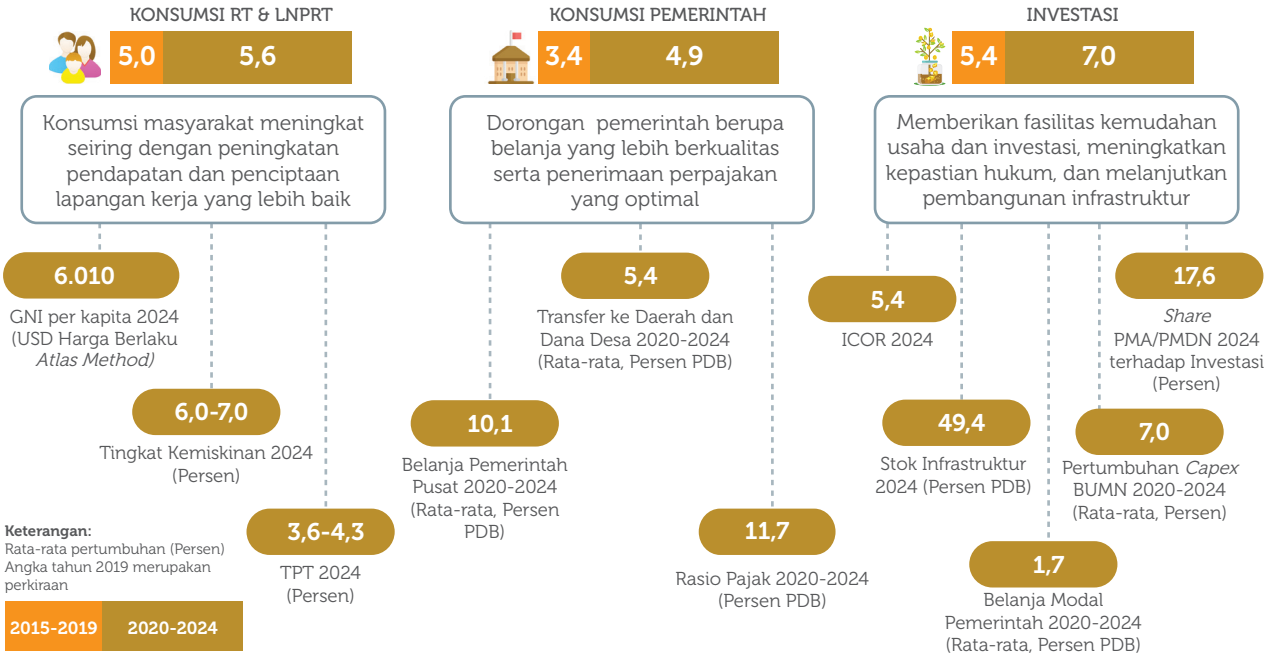

Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

Secara keseluruhan, ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,8 persen per tahun. Peningkatan ekspor barang tahun 2020-2024 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi dan mengurangi ketergantungan impor. Peningkatan juga didorong oleh peningkatan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor. Perluasan pasar ekspor utamanya dilakukan ke kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Sementara impor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 4,8 persen per tahun didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi.

Kinerja perdagangan internasional yang membaik akan mendorong penguatan stabilitas eksternal, yang ditandai dengan perbaikan defisit transaksi berjalan menjadi 1,6 persen PDB dan peningkatan cadangan devisa menjadi USD159,8 miliar pada tahun 2024.

Gambar 1.10
Sasaran PDB Sisi Pengeluaran: Diversifikasi Ekspor dan Stabilitas Eksternal

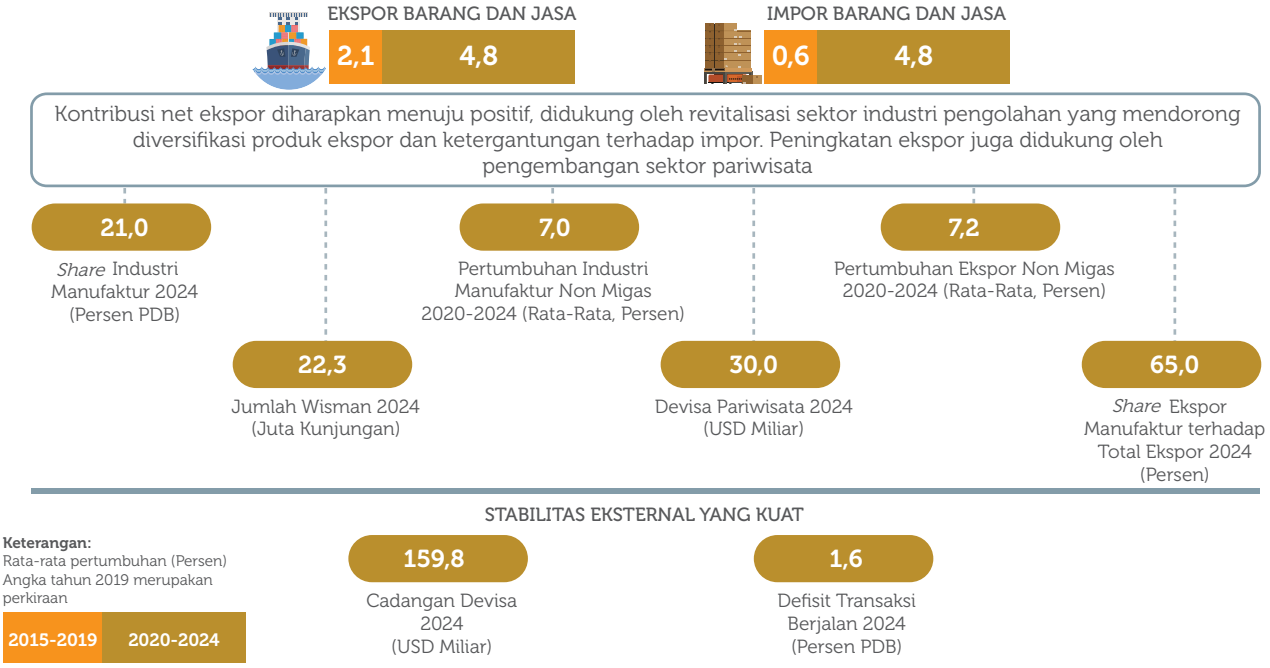

Menjaga Kesinambungan Fiskal

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga APBN yang sehat dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Pendapatan negara ditargetkan meningkat menjadi rata-rata 13,8 persen PDB per tahun, dengan rasio perpajakan mencapai rata-rata 11,7 persen PDB per tahun. Hal ini dicapai melalui perbaikan yang berkelanjutan baik dari sisi administrasi maupun kebijakan perpajakan. Dari sisi administrasi, terus dilakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya perbaikan basis data perpajakan dan peningkatan kepatuhan. Dari sisi kebijakan, pemerintah terus melakukan penggalian potensi penerimaan, antara lain potensi yang berasal dari aktivitas jasa digital lintas negara, reformasi kebijakan cukai melalui penyederhanaan struktur tarif cukai Hasil Tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai. Kebijakan ini juga diimbangi dengan peran kebijakan perpajakan sebagai instrumen pendorong investasi melalui penyediaan insentif fiskal yang mendukung aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi (industri manufaktur, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital).

Stimulus terhadap perekonomian lainnya juga dilakukan dengan penajaman belanja negara. Total belanja negara diperkirakan mencapai rata-rata 15,5 persen PDB per tahun, dengan belanja pemerintah pusat mencapai rata-rata 10,1 persen PDB per tahun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 5,4 persen PDB. Defisit akan dijaga pada rata-rata 1,7 persen PDB selama tahun 2020-2024, berada di bawah batas defisit yang diamanatkan oleh undang-undang. Keseimbangan primer diarahkan menuju positif. Dengan komposisi tersebut, rasio utang akan dijaga di bawah 30 persen PDB.

Gambar 1.11
Proyeksi Postur APBN Tahun 2020-2024

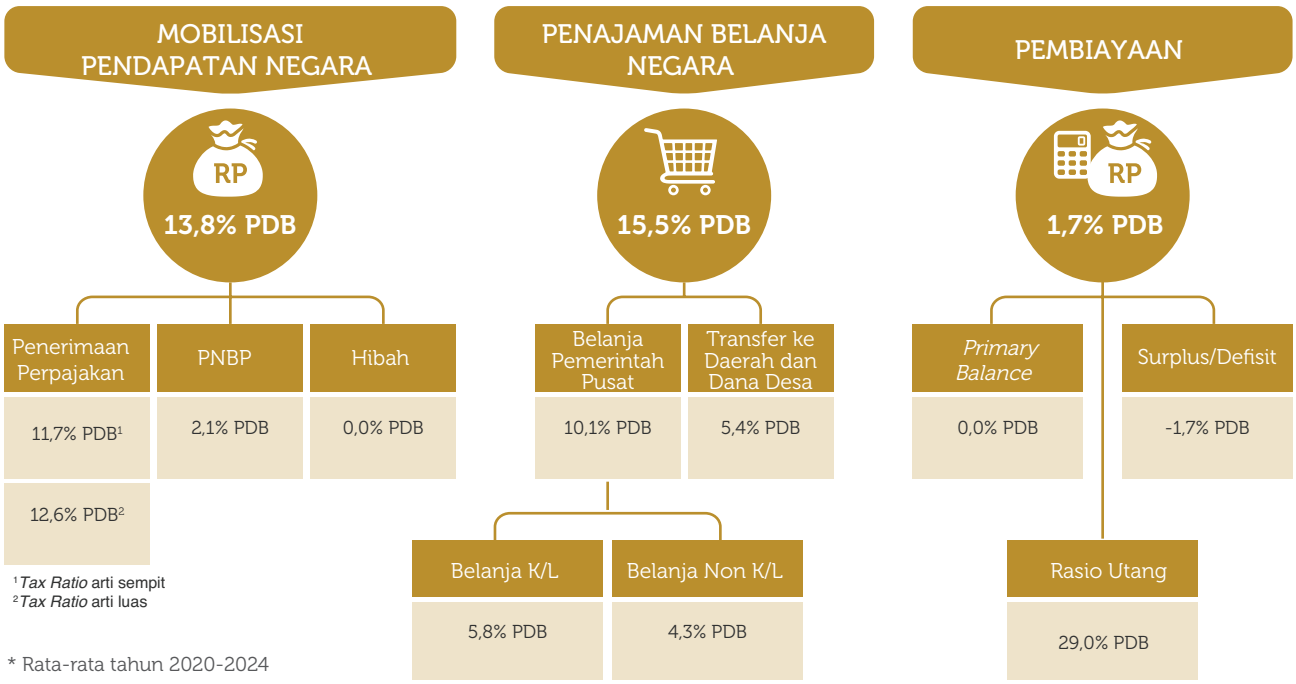

¹ *Tax Ratio* arti sempit
² *Tax Ratio* arti luas

* Rata-rata tahun 2020-2024

Menjaga Stabilitas Inflasi dan Nilai Tukar

Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis; (ii) memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah; (iii) meningkatkan kerjasama antardaerah; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas data/statistik.

Sepanjang tahun 2020-2024, nilai tukar stabil pada tingkat fundamentalnya untuk menjaga daya saing ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan Bank Indonesia; (iii) kecukupan likuiditas; (iv) pendalaman pasar keuangan; (v) penurunan defisit transaksi berjalan; serta (vi) sinergi kebijakan yang diarahkan untuk penerapan reformasi struktural yang mampu meningkatkan daya saing perekonomian domestik.

Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah diharapkan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan di setiap wilayah diharapkan selaras dengan kebijakan di tingkat nasional, dengan tetap memperhatikan keunggulan dan karakteristik wilayah dalam rangka mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Perekonomian nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan agar tumbuh lebih cepat di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Pergeseran perekonomian ditandai dengan bergesernya porsi (*share*) perekonomian secara nominal sebesar 1,2 persen ke luar Pulau Jawa dan Sumatera. Angka pergeseran ini telah mempertimbangkan kemampuan wilayah yang berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Momentum pertumbuhan Pulau Sumatera tetap dijaga dan didorong akan melebihi tingkat pertumbuhan Pulau Jawa. Kebijakan hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan potensi pariwisata, perkuatan infrastruktur konektivitas antarwilayah menjadi kunci percepatan pertumbuhan Pulau Sumatera.

Pulau Jawa – Bali tetap menjadi wilayah yang memiliki porsi (*share*) terbesar dalam perekonomian didorong oleh pergeseran struktur ekonomi ke sektor jasa dengan tetap mempertahankan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pulau Jawa - Bali yang lebih stabil sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Nusa Tenggara bertumpu pada hilirisasi sumber daya alam, perdagangan, dan pariwisata. Pulau Nusa Tenggara diarahkan untuk melakukan diversifikasi industri pengolahan yang berbasis pada sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan mengurangi ketergantungan perekonomian pulau tersebut pada sektor pertambangan.

Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan akan meningkat terutama didorong oleh investasi untuk pembangunan Ibu Kota Negara yang menciptakan efek pengganda besar bagi perekonomian serta hilirisasi sumber daya alam untuk energi.

Pulau Sulawesi masih menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Indonesia Timur dengan didorong oleh investasi untuk hilirisasi sumber daya alam, peningkatan konektivitas sentra industri, dan sebagai pusat perdagangan Kawasan Timur Indonesia.

Perekonomian Kepulauan Maluku diharapkan tumbuh tinggi dengan didorong oleh pengembangan industri perikanan, pariwisata, dan hilirisasi sumber daya alam.

Pulau Papua diharapkan tumbuh lebih tinggi untuk meningkatkan skala ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan didorong oleh hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi industri pengolahan berbasis perkebunan, pangan, dan perikanan. Penguatan konektivitas juga dilakukan untuk menurunkan disparitas harga komoditas dan biaya logistik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Maluku dan Papua diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya.

Gambar 1.12
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi per Pulau

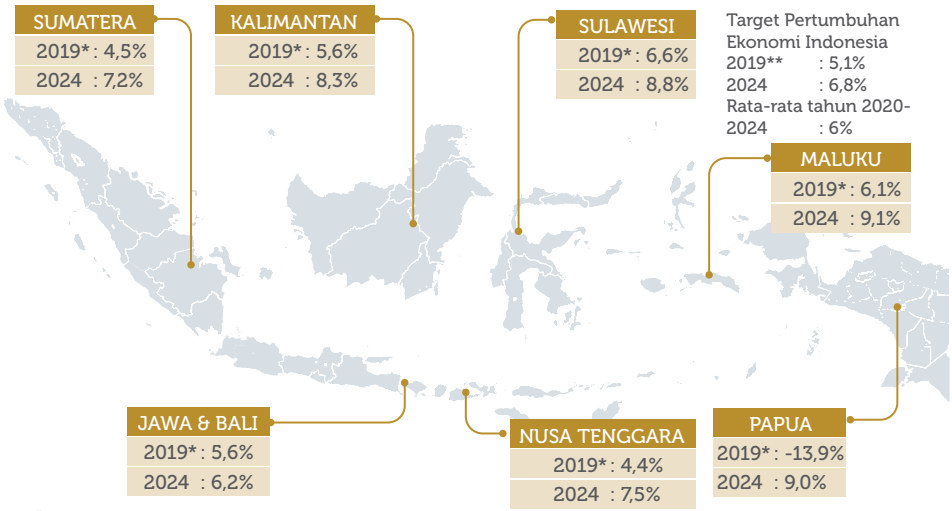

Sumber : Perhitungan Bappenas
* Realisasi sampai dengan tiga triwulan pertama tahun 2019
** Perkiraan

Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp35.428,2 triliun sepanjang tahun 2020-2024. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 9,4 persen dan 8,8 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta.

Pembiayaan kebutuhan investasi pada tahun 2020-2024 diupayakan dengan pendalaman sektor keuangan baik bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.

Pertumbuhan Ekonomi Berwawasan Lingkungan

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH saat ini dan di masa yang akan datang.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran, Sisi Produksi, Dan Perkiraan Struktur Ekonomi (persen, YoY)

Indikator	Perkiraan 2019	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDB	5,1	5,3	5,5	5,9	6,3	6,8
Sisi Pengeluaran						
Konsumsi Masyarakat	5,2	5,0	5,3	5,5	5,8	6,1
Konsumsi Pemerintah	4,7	4,3	4,5	5,1	5,1	5,3
Investasi (PMTB)	4,8	5,6	6,0	6,8	7,8	8,9
Ekspor Barang dan Jasa	-1,2	3,9	3,9	4,5	5,4	6,2
Impor Barang dan Jasa	-8,2	4,3	4,4	4,7	5,1	5,5
Sisi Produksi						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,5	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1
Pertambangan dan Penggalian	1,4	1,9	1,9	1,8	1,9	2,1
Industri Pengolahan	4,1	5,0	5,3	6,4	7,5	8,4
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	3,9	4,2	5,0	5,5	6,0	6,4
Pengadaan Air	7,4	4,0	4,2	4,5	4,8	5,3
Konstruksi	5,7	5,7	5,9	6,3	6,7	7,3
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,8	5,5	5,8	6,4	6,7	7,2
Transportasi dan Pergudangan	5,8	7,0	7,1	7,5	7,9	8,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,6	6,0	6,1	6,4	6,7	7,1
Informasi dan Komunikasi	9,3	7,3	7,7	8,9	10,1	11,2
Jasa Keuangan	6,0	6,3	6,7	7,0	7,6	8,3
Real Estat	5,5	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5
Jasa Perusahaan	9,8	8,3	5,5	5,9	6,3	6,8
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,0	4,5	4,9	5,3	5,7	6,2
Jasa Pendidikan	6,1	5,1	5,5	5,9	6,3	6,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,6	7,5	5,5	5,9	6,3	6,8
Jasa Lainnya	10,1	8,9	9,3	9,5	9,6	9,9
Distribusi PDB (%)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12,5	12,3	12,1	11,9	11,7	11,4
Pertambangan dan Penggalian	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9
Industri Pengolahan	19,7	19,7	19,8	20,0	20,4	21,0
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Pengadaan Air	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Indikator	Perkiraan 2019	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Konstruksi	10,6	10,6	10,7	10,7	10,8	10,8
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,0	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4
Transportasi dan Pergudangan	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	5,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6
Informasi dan Komunikasi	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2
Jasa Keuangan	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4
Real Estat	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
Jasa-jasa Lainnya	11,9	12,0	12,0	12,1	12,1	12,2

Tabel 1.2
Perkiraan Indikatif Neraca Pembayaran Indonesia
(miliar USD)

Indikator	Perkiraan 2019	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Transaksi Berjalan	-31,1	-30,1	-29,8	-29,5	-29,2	-29,0
Barang	0,3	0,9	1,3	3,1	7,8	15,0
- Ekspor	167,9	176,3	185,6	197,5	213,7	233,9
- Impor	-167,6	-175,4	-184,3	-194,4	-206,0	-218,8
Jasa	-7,0	-6,8	-6,3	-5,3	-4,9	-4,4
- Ekspor	31,7	33,9	37,0	41,8	47,3	53,8
- Impor	-38,6	-40,7	-43,3	-47,1	-52,3	-58,2
Pendapatan Primer	-31,7	-31,8	-32,6	-35,3	-40,1	-47,9
Pendapatan Sekunder	7,3	7,6	7,8	7,9	8,0	8,2
Transaksi Modal dan Finansial	33,3	33,5	35,0	36,3	39,4	40,5
Transaksi Modal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Transaksi Finansial	33,2	33,4	34,8	36,2	39,2	40,4
- Investasi Langsung	17,5	20,6	23,5	26,2	29,3	33,9
- Investasi Portofolio	18,6	18,8	20,0	21,1	21,6	22,1
- Derivatif Finansial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Investasi Lainnya	-2,8	-6,0	-8,6	-11,1	-11,7	-15,6
Total (Transaksi Berjalan + Modal dan Finansial)	2,2	3,4	5,2	6,8	10,1	11,5
Memorandum:						
Posisi Cadangan Devisa	122,9	126,2	131,4	138,2	148,3	159,8
- Dalam Bulan Impor	7,1	7,0	6,9	6,9	6,9	6,9
Transaksi Berjalan (% PDB)	-2,8	-2,5	-2,2	-2,0	-1,8	-1,6

Tabel 1.3
Perkiraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (persen PDB)

Indikator	Perkiraan 2019*	Proyeksi Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara dan Hibah o/w	12,6	12,8	13,3	13,9	14,4	14,7
Penerimaan Perpajakan	10,2	10,7	11,1	11,7	12,2	12,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,4	2,1	2,1	2,2	2,2	2,0
Belanja Negara	14,5	14,6	15,1	15,6	15,9	16,2
Belanja Pemerintah Pusat	9,5	9,7	9,8	10,1	10,3	10,4
- Belanja K/L	5,3	5,2	5,7	5,8	5,9	6,1
- Belanja Non K/L	4,2	4,4	4,2	4,3	4,4	4,3
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	5,1	4,9	5,3	5,5	5,6	5,7
- Transfer ke Daerah	4,6	4,5	4,8	5,1	5,2	5,3
- Dana Desa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Keseimbangan Primer	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,2
Surplus/Defisit Anggaran	-1,9	-1,8	-1,8	-1,7	-1,6	-1,5
Pembiayaan o/w	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5
Pembiayaan Utang	2,3	2,0	2,1	2,0	1,8	1,7
Pembiayaan Investasi	-0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Pembiayaan Lainnya	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Batasan Pembangunan
(Development Constraint)

Kondisi Daya Dukung Sumber Daya Alam Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan didefinisikan sebagai batas kemampuan sumber daya alam untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya; serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup kondisi tersebut wajib menjadi pertimbangan dalam setiap proses perencanaan pembangunan karena akan menentukan keberlanjutan pembangunan.

Beberapa parameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup yang perlu diperhatikan meliputi: (a) Tutupan Hutan Primer; (b) Tutupan Hutan di atas Lahan Gambut; (c) Habitat Spesies Kunci; (d) Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim; (e) Kawasan Rawan Bencana; (f) Ketersediaan Air; serta (g) Ketersediaan Energi.

A. Tutupan Hutan Primer

Hutan memberikan jasa lingkungan yang tidak ternilai bagi keberlangsungan kehidupan. Nilai manfaat jasa lingkungan hutan yang paling optimal terdapat pada hutan primer, yakni tutupan hutan alam dengan kondisi masih utuh yang belum mengalami gangguan eksploitasi oleh manusia.

Walaupun laju deforestasi hutan primer telah berhasil dikurangi secara signifikan dengan diterapkannya kebijakan moratorium hutan primer sejak tahun 2011, namun penyusutan tutupan hutan primer masih terjadi di beberapa lokasi tertentu. Pada tahun 2045 diproyeksikan luas tutupan hutan primer tinggal tersisa 45,8 juta ha atau 24 persen dari total luas daratan nasional sebesar 188 juta ha. (Gambar 1.13). Agar dapat mempertahankan fungsinya, maka area hutan primer dalam Peta Moratorium seluas 45-46 juta ha (kondisi tahun 2019) atau sekitar 24-25 persen dari luas total lahan nasional merupakan luas minimal yang harus dipertahankan dalam perencanaan pembangunan.

Gambar 1.13
Proyeksi Penurunan Tutupan Hutan Primer (skenario fair)

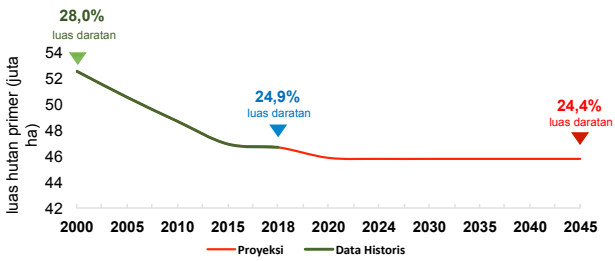

Sumber: Bappenas, 2019

B. Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Selain kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki fungsi hidrologis yang sangat penting dalam mengatur tata air di wilayah sekitarnya, ekosistem gambut juga mengandung cadangan karbon yang sangat tinggi sehingga diperlukan upaya terintegrasi dalam mengkonservasi dan merestorasinya.

Ekosistem gambut saat ini terus mengalami ancaman terutama dari pengeringan lahan gambut, deforestasi, serta kebakaran di lahan gambut yang berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mengganggu fungsi ekosistem gambut tersebut. Luas tutupan hutan, baik hutan primer maupun sekunder yang terletak di atas lahan gambut cenderung semakin berkurang sehingga menunjukkan semakin meluasnya kerusakan pada lahan gambut dari tahun ke tahun (Tabel 1.4).

Total lahan gambut yang telah direstorasi pada kawasan budidaya berizin/konsesi (Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) hanya mencapai 143.448 ha dari target 1.784.353 ha sampai tahun 2020 (8 persen); sementara lahan gambut yang berhasil direstorasi pada kawasan non-izin (HL, HP, KK, APL) baru mencapai 682.694 dari target 892.248 ha sampai tahun 2020 (77 persen). Apabila tidak ada perbaikan kebijakan, dikhawatirkan target pemulihan dan restorasi gambut tidak dapat tercapai dengan optimal.

Dalam rencana pembangunan ke depan total tutupan hutan di atas lahan gambut perlu dipertahankan pada luas minimal 9,2 juta ha seperti kondisi di tahun 2000 sehingga pada periode RPJMN 2020-2024 setidaknya diperlukan tambahan gambut yang direstorasi seluas 1,5-2 juta ha. Untuk itu, upaya restorasi lahan gambut yang telah dilaksanakan secara intensif sejak tahun 2015 perlu tetap menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.

C. Habitat Spesies Kunci

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati serta ciri khas ekosistem yang spesifik dengan tingkat endemisitas spesies yang tinggi pada masing-masing pulau. Beberapa spesies endemik yang terdapat di Indonesia antara lain komodo (*Varanus komodoensis*), orangutan (*Pongo spp.*), burung cendrawasih (*Paradisaea ssp.*), badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), maleo (*Macrocephalon maleo*), dan anoa (*Bubalus spp.*).

Salah satu faktor pembatas yang harus menjadi perhatian utama dalam merencanakan pembangunan di Indonesia adalah habitat dari spesies kunci. Spesies kunci ini adalah tumbuhan

Tabel 1.4
Perubahan Luas Tutupan Hutan di Atas Lahan Gambut

Pulau	Luas Lahan Gambut (Ha)	Luas Tutupan Hutan di Lahan Gambut			
		2000		2015	
		Ha	%	Ha	%
Sumatera	4.120.325	1.789.500	43,43	837.675	20,33
Kalimantan	4.694.625	2.545.300	54,22	1.871.800	39,87
Papua	6.376.975	4.896.300	76,78	4.817.275	75,54
Total Nasional	15.191.925	9.231.100	60,76	7.526.750	49,54

Sumber: Bappenas, 2019

Gambar 1.14
Proyeksi Penyusutan Tutupan Hutan pada Habitat Beberapa Spesies Kunci selama periode 2000-2045

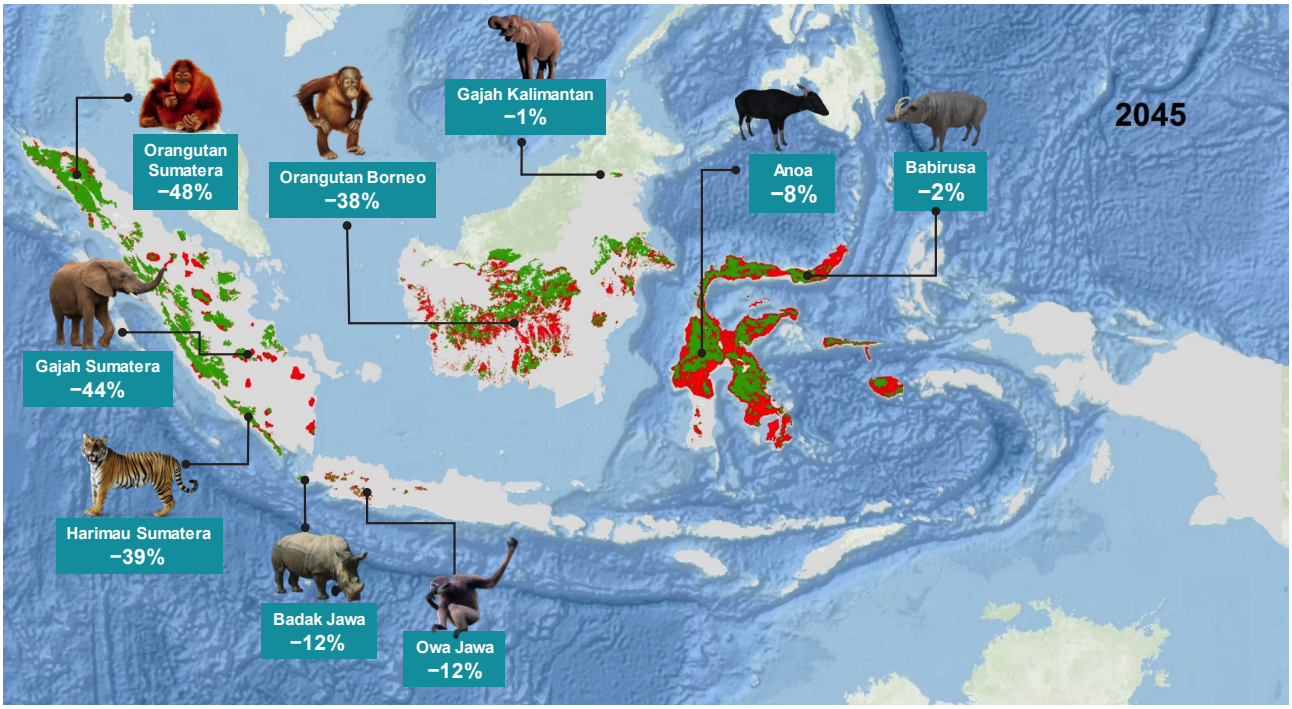

Sumber: Bappenas, 2019

atau satwa yang diprioritaskan untuk dilindungi serta dapat mewakili keanekaragaman hayati secara keseluruhan dalam sebuah ekosistem. Kehilangan spesies kunci akan mengakibatkan gangguan terhadap keberlanjutan struktur, fungsi dan produktifitas dari habitat/ekosistem tersebut.

Terdapat sembilan spesies kunci yang menjadi faktor pembatas di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu Babirusa, Anoa, Badak Jawa, Owa Jawa, Gajah Kalimantan, Orang Utan Kalimantan, Orang Utan Sumatera, Gajah Sumatera, dan Harimau Sumatera. Habitat spesies kunci ini diproyeksikan akan berkurang secara signifikan akibat pengurangan luas tutupan hutan, sehingga menjadikan spesies tersebut semakin terancam punah (Gambar 1.14).

Analisis menunjukkan bahwa tutupan hutan pada habitat spesies kunci di sebelah barat Garis *Wallacea* akan menyusut dari 80,3 persen di tahun 2000 menjadi 49,7 persen di tahun 2045, terutama pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan luas *key biodiversity* areas di sisi timur Garis *Weber*, khususnya wilayah Maluku dan Papua diperkirakan juga berkurang signifikan akibat dari masifnya pembangunan. Sebagai wilayah yang mengalami penurunan luas habitat spesies kunci terbesar maka pembangunan di wilayah Sumatera dan Kalimantan harus lebih mempertimbangkan keberadaan habitat dari spesies yang terancam punah tersebut.

Sesuai hasil analisis tersebut, luas tutupan habitat spesies kunci secara nasional terutama di sebelah barat Garis *Weber* yang harus dipertahankan adalah

minimal seluas 43,2 juta ha. Bila luasan habitat satwa kunci ini tidak dapat dipertahankan maka dikhawatirkan mengganggu fungsi ekosistem yang dapat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

D. Luas Pemukiman di Area Pesisir terdampak Perubahan Iklim

Kemiringan lereng pantai menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kerentanan di daerah pesisir pantai. Daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan tinggi adalah daerah yang rawan terjadi abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang rendah (landai). Sedangkan daerah pesisir pantai yang memiliki tingkat kerentanan yang rendah merupakan daerah yang aman dari bahaya abrasi, yaitu pantai dengan tingkat kemiringan yang tinggi (curam).

Tinggi muka air laut pada tahun 2040 diproyeksikan akan mengalami kenaikan hingga 50 cm dibandingkan pada tahun 2000 akibat dampak perubahan iklim. Kenaikan tinggi gelombang laut ini akan mendorong perubahan kemiringan lereng pantai dan lingkungan pantai akibat banjir dan perubahan suplai sedimen sehingga diperkirakan meningkatkan cakupan luas wilayah permukiman di pesisir yang rentan abrasi/akresi akibat perubahan tinggi muka air laut hingga sepanjang lebih dari 18.480 km di tahun 2045.

Berdasarkan hasil analisis diketahui daerah pemukiman yang saat ini sudah terkena efek abrasi/akresi sepanjang 11 km. Daerah pemukiman yang berpotensi terkena efek abrasi/akresi sepanjang 253 km. Sedangkan daerah pemukiman yang perlu waspada akan dampak abrasi/akresi sepanjang 155 km. Kondisi tersebut menjadi faktor pembatas pembangunan karena akan mengancam permukiman dan infrastruktur lain yang sudah ada, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada tingginya gelombang laut yang mempengaruhi pola penangkapan ikan dan nelayan.

E. Kawasan Rawan Bencana

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam. Sebagian besar wilayah Indonesia terletak di atas jalur-jalur sumber gempa besar dari zona *megathrust*-subduksi lempeng dan sesar-sesar aktif sehingga bukan hanya berpotensi menimbulkan kerusakan infrastruktur dan konektivitas dasar namun juga dapat menimbulkan kerugian korban jiwa yang sangat besar.

Kawasan rawan bencana harus dipertimbangkan sebagai batasan dalam merencanakan pembangunan. Oleh karena itu, zona dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi perlu diprioritaskan menjadi kawasan lindung dalam penataan ruang wilayah, alih-alih dijadikan sebagai kawasan budidaya. Apabila tidak bisa dihindari sebagai kawasan budidaya, maka perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana.

F. Ketersediaan Air

Kerusakan tutupan hutan diperkirakan akan memicu terjadinya kelangkaan air baku khususnya pada pulau-pulau yang memiliki tutupan hutan sangat rendah seperti Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kelangkaan air baku juga mulai terjadi pada beberapa wilayah lainnya dikarenakan dampak dari perubahan iklim global yang menerpa sebagian besar wilayah Indonesia.

Saat ini ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali. Diperkirakan luas wilayah kritis air meningkat dari 6 persen (2000) menjadi 9,6 persen (2045), yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi bagian selatan.

Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat pembangunan maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175,5 juta ha (93 persen dari luas wilayah Indonesia); sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1.000 m^3/kapita/tahun. Khusus untuk Pulau Jawa, mengingat ancaman krisis air sudah sangat mengkhawatirkan maka proporsi wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.

G. Ketersediaan Energi

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak dan gas bumi semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

Suplai energi dari dalam negeri pada tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75 persen dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi nasional di masa yang akan datang.

Guna memenuhi kebutuhan energi nasional, maka pada tahun 2024 porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga minimal 19,5 persen dari bauran energi nasional. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber daya energi fosil di masa mendatang.

Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan degradasi daya tampung lingkungan hidup merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan tersebut. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi dan struktur ruang dalam pembangunan kewilayahan.

Kapasitas Fiskal dan Pendanaan Pembangunan

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui investasi publik yang berkualitas yaitu: 1) Tepat sasaran dan waktu; 2) Memberikan dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan; 3) Konsisten dengan arah kebijakan, program, dan rencana pembangunan; serta 4) Penggunaan sumber daya dan dana yang efisien.

Dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara yang berpendapatan setara. Akar permasalahan utama dari rendahnya *tax ratio* tesebut adalah kebijakan perpajakan yang belum cukup memadai untuk mewujudkan sistem perpajakan yang mampu memobilisasi penerimaan perpajakan secara optimal. Selain itu, sistem administrasi perpajakan, kepatuhan individu dalam kewajiban perpajakan, serta peran kelembagaan perpajakan turut mempengaruhi terhadap belum optimalnya kinerja perpajakan. Berbagai permasalahan perpajakan tersebut menyebabkan terbatasnya ruang fiskal untuk mendanai kebutuhan pembangunan.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal dalam membiayai kebutuhan pembangunan yang besar dan semakin beragam, diperlukan sebuah strategi pendanaan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan seluruh kapasitas pendanaan yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pemanfaatan pendanaan pembangunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (*leverage*) yang tinggi bagi pembangunan nasional. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan perlu didorong dan disinergikan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. Untuk itu, perlu mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan. Untuk pemerintah pusat dan daerah diarahkan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, sedangkan untuk badan usaha (BUMN dan Swasta) difokuskan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan perlu dilakukan integrasi pendanaan pembangunan pada sumber pemerintah (K/L, Non K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) serta pembiayaan yang berasal dari BUMN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, maupun masyarakat yang selaras dengan implementasi prinsip *Money Follow Program*. Selain itu, pemerintah perlu lebih mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya.

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMBANGUN KEMANDIRIAN

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

Memiliki sumber daya manusia yang berkarakter, unggul, bertanggung jawab, dan kreativitas tinggi untuk dapat menjadi modal pembangunan bagi bangsa sendiri.

Memiliki penguasaan atas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan sumberdaya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan kemandirian bangsa.

Mampu mengelola sumber daya alam melalui proses nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menjadi negara yang selalu aktif dan terbuka dalam bekerjasama untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

MENJAMIN KEADILAN

Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapatkan manfaatnya.

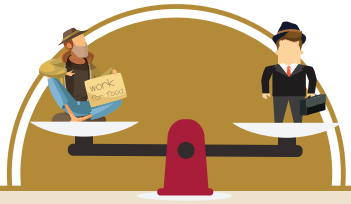

Penegakan hukum yang menjamin kesetaraan, keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat pada masyarakat.

Menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

MENJAGA KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Keadilan antar generasi dimana setiap generasi manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.

Keadilan dalam satu generasi, dimana keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia dimana beban permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.

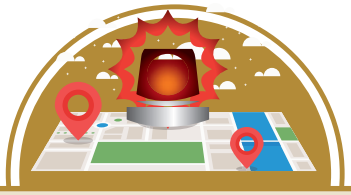

Pencegahan dini, dimana apabila terjadi ancaman yang berarti yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan maka ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Perlindungan keanekaragaman hayati merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati.

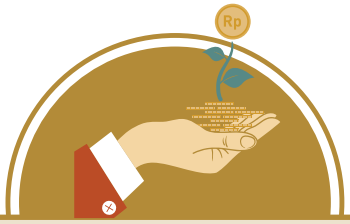

Internalisasi biaya lingkungan, dimana kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena, itu biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam.

Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 3 (tiga) pengarustamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Ketiga *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: pengarusutamaan *gender*, kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan upaya internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk memperkuat efektivitas perilaku kolektif maupun individu dalam seluruh proses pembangunan.

Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

AGENDA PEMBANGUNAN 1

AGENDA PEMBANGUNAN 2

Kegiatan Prioritas

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
3. Pengembangan Kawasan Perkotaan
4. Pemenuhan Pelayanan Dasar
5. Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
6. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

AGENDA PEMBANGUNAN 3

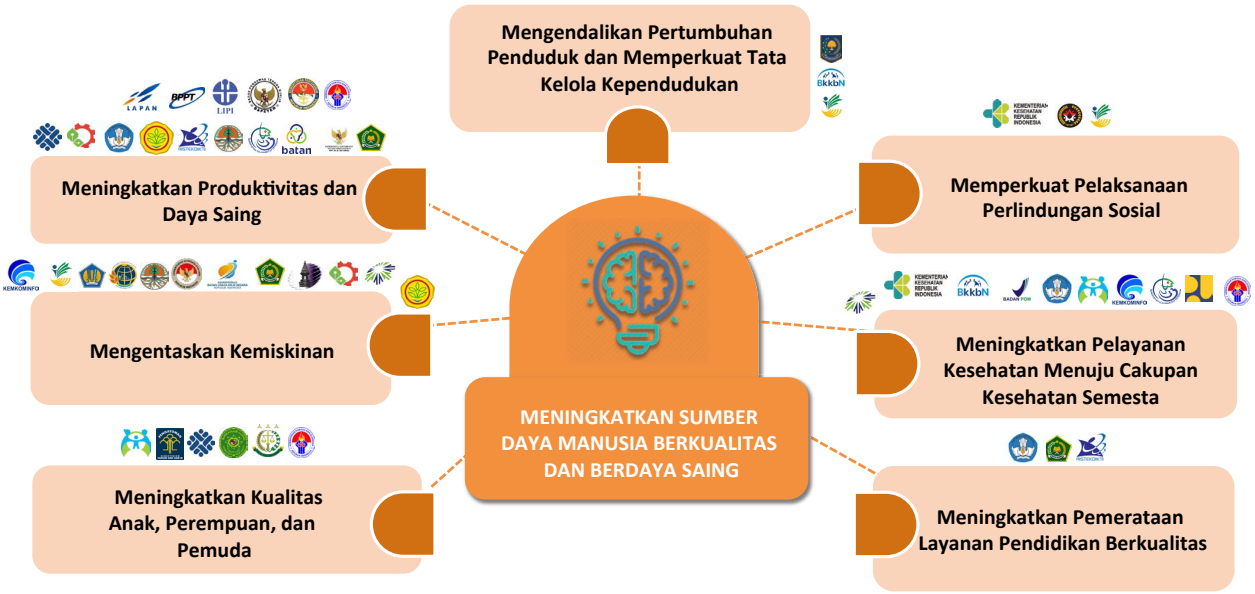

AGENDA PEMBANGUNAN 4

AGENDA PEMBANGUNAN 5

AGENDA PEMBANGUNAN 6

AGENDA PEMBANGUNAN 7

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah.

Di dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan *Major Project* dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Selain itu, *Major Project* dapat menjadi alat kendali pembangunan sehingga sasaran dan target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat terus dipantau dan dkendalikan.

Rincian Indikator *Major Project* memenuhi kaidah SMART (*Specific, Meassurable, Achievable, Realiable, Timeable*).

Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) RPJMN 2020-2024

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	**Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas:** Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	• Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 19,9%-21,1%	**103,2** • APBN: 19,7 • KPBU 0,9 • Swasta: 82,6	a.l Kemenperin, Kemendag, KPPU, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	**10 Destinasi Pariwisata Prioritas:** Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	• Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) • Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)	**151,8** • APBN: 56,2 » PLHN: 7,3 • KPBU 1,4 • Swasta: 94,2	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	**8 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter**	• Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa	**149,4** • APBN: 7,6 • KPBU: 0,8 • Swasta: 141	a.l KemenESDM, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	**Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan**	• Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5,8% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 7,92% per tahun.	**251** • APBN: 237 • Swasta: 14	a.l Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	**Pembangunan Energi Terbarukan *Green Fuel* Berbasis Kelapa Sawit**	• Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional minimal 19,5%	**100,53** • APBN: 0,53 • BPDPKS: 75 • Swasta : 25	a.l Kementan KemenESDM, BPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	***Be Creative District* di Maja - Rangkasbitung, dan Karawang**	• Mendukung peningkatan investasi sebesar Rp 90 Triliun • Penciptaan 2 Juta lapangan kerja baru dibidang ekonomi kreatif	**100,3** • APBN: 0,3 • K/L, PINA, KPBU: 10 • Swasta dan BUMN 90	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	**Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng di Sumatera, Sulawesi, Jawa, NTB, dan Kalimantan.**	• Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	**25** • APBN: 2,5 • Swasta: 22,5	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
8	**Integrasi Pelabuhan Perikanan dan *Fish Market* Bertaraf Internasional**	• Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024	**50** • APBN: 10 • KPBU dan Swasta: 40	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
9	**Integrasi Pembangunan Wilayah Batam – Bintan**	• Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan	**28,04** • APBN: 0,04 • KPBU: 18,5 • Swasta: 5,4 • BUMN: 4,1	a.l BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	**Pengembangan Wilayah Metropolitan:** Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	• Meningkatnya *share* PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional • Menigkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan	**274,5** (APBN, KPBU & Swasta)	KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
11	**Ibu Kota Negara (IKN)**	• Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah	**466** (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPPN/ Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
12	**Pengembangan Kota Baru:** Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	• Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong)	**3,6** (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
13	**Wilayah Adat Papua:** Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay	**27,5** (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kementan, KemenDesa PDTT, Kemenhub, Pemda
14	**Pemulihan Pascabencana:** (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	• Meningkatnya infrastruktur berketahanan bencana dan pelayanan dasar di Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda	**50,7** • APBN: 40,4 • APBD: 1,9 • Hibah RR: 3,2 • Masyarakat dan Badan Usaha: 5,2	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
15	**Pusat Kegiatan Strategis Nasional:** PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	• Pusat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya	**7,8** • APBN: 7,4 • KPBU: 0,4	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	**Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting***	• Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup • Menurunnya prevalensi *stunting* hingga 14%	**159,1** • APBN: 159,1 » DAK: 21,0	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemensos, Kemendagri, Pemda
17	**Pembangunan *Science Techno Park*** (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)	• Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional	**2,3** (APBN)	a.l Kemenristek/ BRIN, Kemendikbud, Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI)
18	**Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0**	• Meningkatnya angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas menjadi 52,1% (2024) • Meningkatnya pekerja berkeahlian menengah dan tinggi menjadi 50% (2024)	**332,5** (APBN dan Swasta)	a.l Kemenaker, Kemdikbud
19	**Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh**	• Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial • Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan	**1.210** (APBN)	a.l Kemensos, KemenKominfo, Kemendikbud, Kemenristek/ BRIN, Kemendag, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS
20	**Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung**	• Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam	**309** • APBN: 140,9 • Badan Usaha: 168	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
21	**KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)**	Berkurangnya waktu tempuh: • Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam • Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit	**100** • APBN: 58 • Badan Usaha: 42	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
22	**Kereta Api Makassar-Pare Pare**	• Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan *Makassar New Port* • Mengurangi beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun)	**13,1** • APBN: 10,8 • Badan Usaha: 2,3	a.l Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
23	**Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu**	• Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama (nilai *turn round time* maksimum 24 jam) • Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk *loop* secara teratur menjadi 27% • Menurunkan biaya operasional pelabuhan sebesar 15%, menurunkan defisit neraca jasa sebesar 10% & biaya logistik sebesar 1,6% terhadap PDB (Rp 765 T selama 5 tahun)	**113** • APBN: 2 • BUMN: 34 • KPBU dan Swasta : 77	a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
24	**Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan:** Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	• Meningkatkan pangsa pasar pengguna angkutan umum setiap kota 30%	**147,05** • APBN: 63,08 • Badan Usaha: 32,83 • APBD: 51,14	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
25	**Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak**	• Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1,9 Juta Barrel Per Hari di tahun 2026; • Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas.	**637** (Badan Usaha)	a.l Pertamina, KemenESDM, Kemenkeu, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
26	**Pembangkit Listrik 25.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA**	• Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,5% • Menyediakan pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 • Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada 2024 • Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/ pelanggan di 2024 • Memenuhi kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional	**463** (Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
27	**Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital**	• Mengurangi kesenjangan digital • Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	**478** • KPBU: 3 • APBN: 37 • Swasta: 438	a.l KemenKominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
28	**Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa**	• Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon • Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit)	**48,8** • APBN: 43,8 » DAK: 2,8 • KPBU: 5	a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
29	**18 Waduk Multiguna**	• Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m^3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW • Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan • Peningkatan efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI	**92,96** • APBN: 12,96 • KPBU: 20 • Swasta : 60	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
30	**37 Rute Jembatan Udara di Papua**	• Menurunkan disparitas harga bahan pokok di Wilayah Papua mencapai rata-rata sebesar 57,21%	**10,2** (APBN)	a.l Kemenhub,
31	**Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan**	• Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas	**12** • APBN: 12 » DAK: 8,4	a.l KemenPUPR, Pemda
32	**Jalan Trans Papua Merauke - Sorong**	• Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perdalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua • Mengurangi biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%.	**15,3** (APBN)	a.l KemenPUPR, Pemda,
33	**Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)**	• Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	**188,9** • APBN: 123 » DAK: 22,3 • APBD: 7,5 • Masyarakat: 55,5 • Swasta: 2,9	a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
34	**Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)**	• Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	**162** • APBN: 93,3 » DAK: 35,6 » Hibah: 14,6 • APBD: 34,7 • KPBU: 33,9	a.l KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ BUMD/Swasta)
35	**Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)**	• Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh	**350** • APBN, APBD & KPBU: 175 • BUMN/Swasta: 175	a.l KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	*Major Project*	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
36	**Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah**	• Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun • Mengurangi impor LPG sebesar 603,720 Ribu ton per tahun	**39,55** • Badan Usaha: 6,71 • APBN: 39,55 • KPBU: 28,62	a.l KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
37	**Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis**	• Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha • Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara	**30,6** • APBN: 30,6 » DAK: 3,2	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,
38	**Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 KM)**	• Menyambungkan jaringan pipa gas bumi wilayah Kalimantan (Trans Kalimantan); • Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; • Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara; • Mendorong pemanfaatan potensi gas bumi di wilayah Natuna	**36,4** (Badan Usaha)	a.l. KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
39	**Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3**	• Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/tahun • Mengurangi 30% biaya transportasi pengelolahan limbah B3	**4,6** • APBN: 0,6 • KPBU: 3 • Swasta Murni: 1	a.l KemenLHK, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
40	**Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana**	• Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit	**9,5** (APBN)	a.l BMKG, BNPB, KemenLHK, KemenESDM, BIG
41	**Penguatan NSOC - SOC dan pembentukan 121 CSIRT**	• Menurunnya insiden serangan siber; • Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar *stakeholder* terkait (baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya).	**7,78**	a.l BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN

Kementerian PPN/
Bappenas

Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telp: (021)31936207 Fax: (021)3145374
www.bappenas.go.id